

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung: Alumi, 2003.
- Chaerudin, dkk, *Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hasbullah, Fireda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan Jilid I*, Jakarta: Indi-Hill Co, 2002.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Herimulyanto, Agustinus, *Sita Berbasis Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi (Teori dan Terapan Value-Based Confiscation System)*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.
- Hutagalung, Arie. S. *Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi, Suatu Kumpulan Karangan, Cetakan Kedua*, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002.
- Iswardono, *Uang dan Bank*, Yogyakarta: BPFE, 1991.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Lamintang, P. A. F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.
- MD, Mahfud, *Dekonstruksi Dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif, Konsorsium Hukum Progresif, Cet.1*, Yogyakarta: Thafa Media, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Cet-1*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murhainis, Rusdy, *Kredit Perbankan dan Lembaga Jaminan Hak Tanggungan*, Bandung: Bina Cipta, 2009.
- Nawawi, Irsan, *Penyitaan dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2007.

- Putra, Eddy Aman, *Fungsi Jaminan dalam Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Cipta Aditya Bakti, 2006.
- Sidik, Salim H, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hak Tanggungan Azas-Azas Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Suatu Kajian Mengenal Undang-Undang Hak Tanggungan*, Bandung: 1999.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset, 2013.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2001.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1963.
- \_\_\_\_\_, *Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1978.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Perdata*, Bandung: Bina Cipta, 1989.
- Supardji, *Keadilan Sosial, Sistem Hukum, dan Analisis Ekonomi atas Hukum*, Jakarta: UAI Press, 2022.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum & Globalisasi*, ed. by Ufran, Yogyakarta: Genta Press, 2007.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ujan, Andre Ata, *Keadilan Dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wery, P.L. *Perkembangan Hukum tentang Itikad Baik di Negerland*, Jakarta: Percetakan Negara RI, 1990.
- Yanuar, Purwaning M, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Bandung: PT Alumni, 2007.

### Artikel Jurnal

- Adhinanta M.S, dan Armansyah, Kekuatan Eksekusi Hak Tanggungan Yang Dirampas Negara Terkait Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701K/PDT/2017), *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan Imanot*, Vol.2, No.01, Desember. 2022.
- Hiariej, Eddy O.S. “Pengembalian Aset Kejahatan” *Jurnal Opini Juris*, Vol. 13 Mei Agustus. 2013.
- Latif, Abdul, Jaminan UUD 1945 dalam Proses Hukum yang Adil, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 1. 2010.
- Putri, Annisya Dwi Rahmayani dan Lina Jamilah, Perjanjian Jaminan Personal Guarantee dalam Terwujudnya Kepastian Hukum, *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol. 3, No. 1, 2023.
- Veranita, Meiska, Kedudukan Hukum Penjamin Perorangan (Personal Guarantor) dalam hal Debitur Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Repertorium*, Vol II, No.2, 2015.
- Salasa, Arif, Penyitaan sebagai Objek Pra Peradilan, *Lex Privatum*, Vol. 4, No.3, 2016.
- Sumadi, Ahmadi Fadlil, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Kenegaraan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2015.
- Vlasic, Mark V & Gregory Cooper, “Beyond the Duvalier Legacy: What New Arab Spring Governments Can Learn From Haiti and The Benefits of Stolen Asset Recovery”, *Journal of Internasional Human Right*, Vol. 10, No.3, Northwestern. 2011.

### Tugas Akhir/Tesis

- Dea Kusuma Wardani, Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan yang Disita dan Dirampas oleh Negara Terkait Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2021.
- Didit Agung Nugroho, Eksekusi Putusan Pengadilan Terhadap Barang Rampasan Berupa Aset Terpidana Korupsi yang Dibebeani Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1153 K/PID/2005 dan Sertifikat Hak Tanggungan, *Tesis*, Universitas Airlangga, Surabaya. 2012.
- Engeline Yuniendah Dwiputri Ayu Lestari Polimpung, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Kreditur Pemegang Hak Tanggungan atas Objek

Jaminan yang Terbukti Berasal dari Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang. 2018.

Ulfah Rahmah Wati, S.H., Eksekusi Perampasan Aset Pada Tindak Pidana Korupsi yang Dibatalkan Melalui Gugatan Perdata, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta. 2023.

Yudha Aziiz Sudarto, 2018, Kedudukan Hukum Kreditor Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Objek Jaminan yang Disita oleh Negara Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, *Tesis*, Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur. 2018.

### **Prosiding Seminar/ Pertemuan Ilmiah**

Noegroho, Tavianto, Direktur Lelang pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI, disampaikan dalam *Focus Group Discussion (FGD)* “Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sitaan Eksekusi di Kejaksaan RI Pasca Dibentuknya Badan Pemulihan Aset” Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Atria Hotel-Serpong, 7 November 2024.

Pramono, Nindyo. Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2024. seminar *Focus Group Discussion (FGD)* Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2024, “Perlakuan Terhadap Objek Sita Eksekusi Berkaitan dengan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Jakarta, 25 September 2024.

Sarwono, Andi. *Remedial & Recovery Legal Service Departement Head*, Divisi Legal BNI. 2024. *Focus Group Discussion (FGD)* “Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sitaan Eksekusi Di Kejaksaan RI Pasca Dibentuknya Badan Pemulihan Aset” Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Atria Hotel-Serpong, 7 November 2024.

Sumardjono, Maria S.W. Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2024. seminar *Focus Group Discussion (FGD)* Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2024, “Perlakuan terhadap Objek Sita Eksekusi Berkaitan dengan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Jakarta, 25 September 2024.

Syandriadi, Tedy. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 2024. seminar *Focus Group Discussion (FGD)* Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2024 “Perlakuan terhadap Objek Sita Eksekusi Berkaitan dengan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Jakarta, 25 September 2024.

Yanto. Hakim Agung Kamar Pidana. 2024. seminar *Focus Group Discussion (FGD)* Bidang Tindak Pidana Khusus Tahun 2024, “Perlakuan Terhadap Objek Sita

Eksekusi Berkaitan dengan Hak-Hak Pihak Ketiga yang Beritikad Baik”, Jakarta, 25 September 2024.

Zulkipli. Jaksa pada Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan RI. 2024. *Focus Group Discussion (FGD) “Optimalisasi Percepatan Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sitaan Eksekusi Di Kejaksaan RI Pasca Dibentuknya Badan Pemulihan Aset”* Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI, Atria Hotel-Serpong, 7 November 2024.

### Wawancara

Aji, Wikan Sinatrio. Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan RI. 2024. “Upaya Hukum atas Penyelesaian Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang Dibebani Hak Tanggungan”, *wawancara*, Jakarta, 13 Desember 2024.

Febri, Hendra. Assistant Vice President (AVP)/ Team Leader Credit Compliance & Legal Administrations Retail Credit Operations. 2024. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Menyalurkan Kredit”, *wawancara*, Jakarta, 4 Desember 2024.

Febrianto, Ruri. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. 2024. “Penanganan Penyelesaian Eksekusi Barang Rampasan Aset Jaminan Hak Tanggungan Terkait Pembayaran Uang Pengganti pada Perkara Helmi Kamal Lubis”, *wawancara*, Jakarta, 2 Desember 2024.

Madyo, Nurcahyo Jungkung. Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia. 2024. “Penyitaan dan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi Menurut Sudut Pandang Seorang Jaksa”, *wawancara*, Jakarta, 4 Desember 2024.

Pardede, Sonora Gokma. Jaksa Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI. 2024. “Pelaksanaan Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang Berkaitan dengan Hak Tanggungan”, *wawancara*, Jakarta, 10 Desember 2024.

Wiryanan, Palupi. Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 2024. Kewenangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), *wawancara*, Jakarta, 2 Desember 2024.

### Internet

BBC News Indonesia, “Deflasi lima bulan berturut-turut, tanda masyarakat kelas pekerja sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c9wkd982krvo> (diakses 14 November 2024).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Nomor 194 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987).

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2041).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Keberatan Pihak Ketiga yang Beritikad Baik terhadap Putusan Perampasan Barang Bukan Kepunyaan Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 534).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-002/A/JA/05/2017 Tahun 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara Atau Benda Sita Eksekusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1572).

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 568).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1107).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 148).

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti (Pasal 34 Sub c UU Nomor : 3 Tahun 1971).

Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan, Barang Bukti, Barang Rampasan Negara, dan Benda Sita Eksekusi di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyitaan dan Penyelesaian Barang Rampasan Negara (BRN) serta Sita Eksekusi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor B-2099/F/Fu/12/2021 tanggal 06 Desember 2021 tentang Petunjuk Penyelesaian Eksekusi Tunggakan Uang Pengganti.

### **Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1731/Pdt/2011 perihal Kasasi keberatan PT Bank Mega Tbk tanggal 14 Desember 2011.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 159/Pdt/2016/PT. Mnd perihal Banding keberatan PT Bank PAN Kantor Cabang Utama Banjarmasin tanggal 5 Desember 2016.

Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 70/Pdt.Bth/2015/N.Bit perihal gugatan keberatan PT Bank PAN Kantor Cabang Utama Banjarmasin tanggal 1 Maret 2016.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2701 K/ Pdt 2017 perihal Kasasi keberatan PT Bank PAN Kantor Cabang Utama Banjarmasin tanggal 11 Desember 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2088 K/Pid.Sus/2018 perihal Kasasi perkara Muhammad Helmi Kamal Lubis tanggal 30 Oktober 2018.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 674/Pdt.G/2019/PNJkt.Pst perihal gugatan keberatan PT Bank PAN Indonesia tanggal 25 Juni 2020.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Pdt/2022 perihal Kasasi keberatan PT Bank PAN Indonesia tanggal 24 Maret 2022.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 PK/Pid.Sus/2023 perihal Peninjauan Kembali perkara Muhammad Helmi Kamal Lubis 1 Agustus 2023.